



# Terus Tumbuh Menuju **Kemajuan**

15

Kita menghadapi berbagai tantangan serius. Mulai dari pandemi COVID-19, ancaman krisis pangan, krisis energi, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga respon lembaga internasional yang menggugat kebijakan Indonesia. Namun itu semua tidak menyurutkan langkah untuk menyiapkan pondasi kesejahteraan bagi rakyat: kesejahteraan berkelanjutan.

Kompleksitas masalah dan tantangan dijawab dengan langkah-langkah tuntas mulai dari menyeimbangkan tumbuh kembang perekonomian, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Tak cukup dengan itu, kita juga mengganti, mengoreksi, dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru agar ekonomi berkelanjutan tetap pada relnya.

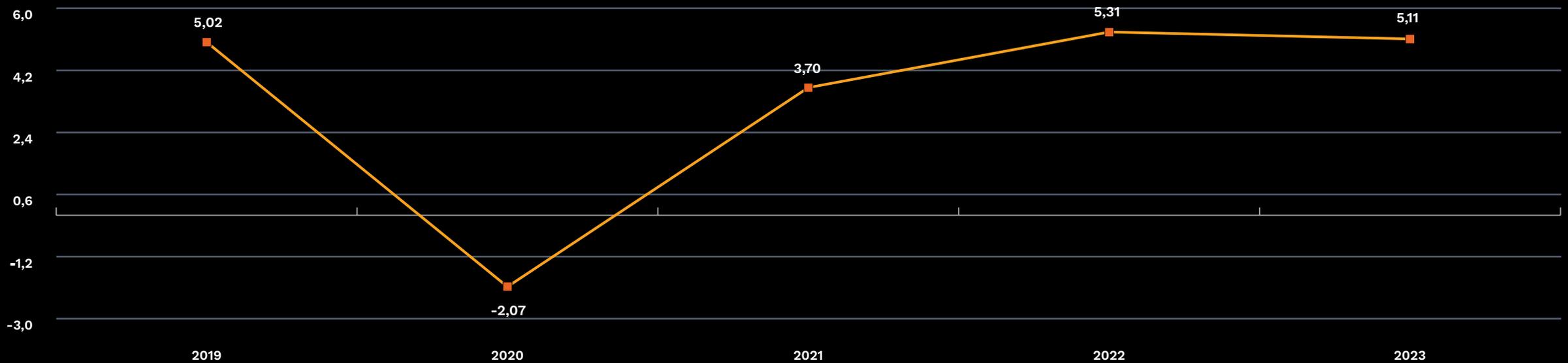


# Ekonomi Kuat, Pulih Lebih Cepat

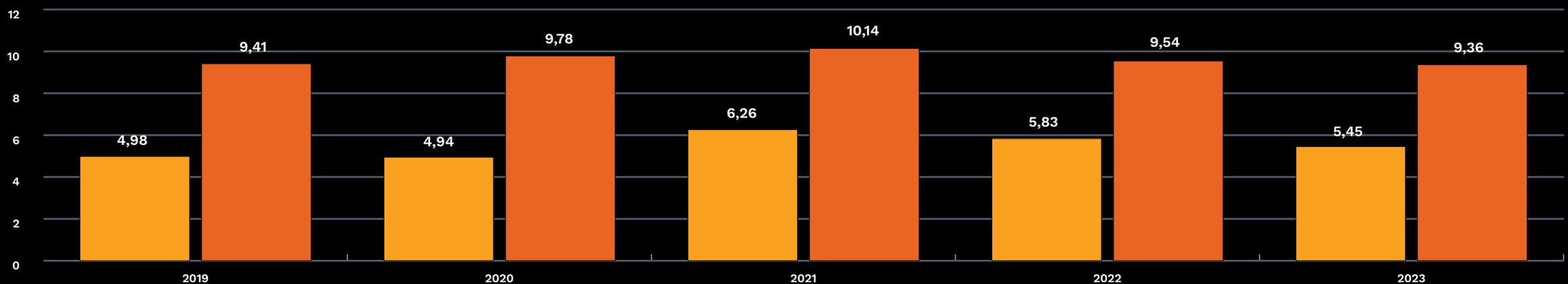
Tahun 2020, Indonesia berhadapan dengan tantangan serius ketika pandemi COVID-19 melanda. Ekonomi negara mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Namun, berkat kerja keras dan sinergi seluruh pihak, ekonomi kita kembali tumbuh positif pada 2021, dan mencapai 5,31% pada 2022. Keberhasilan ini tak lepas dari kinerja ekspor yang tetap kuat, dan permintaan domestik yang solid. Dalam semester I/2023, ekonomi tumbuh 5,11%.

Pemulihan ekonomi membuat pengangguran dan kemiskinan dapat diturunkan mendekati level sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan ekstrem terus melorot pada masa pandemi. Dengan ambang USD 1,9 PPP per hari, selama sembilan tahun tingkat kemiskinan ekstrem turun lebih dari lima persen, pada Maret 2023. Kemiskinan ekstrem terus diupayakan mendekati 0%, pada 2024.

## Pertumbuhan Ekonomi



## Tingkat Pengangguran Terbuka & Angka Kemiskinan (%)



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Kemiskinan

# Memperkuat Konsolidasi Fiskal

Dinamika dunia tidak bisa diprediksi. Ruang fiskal dipaksa untuk bisa lentur mengikuti. Seperti ketika pandemi, defisit anggaran harus diperlebar. Dengan catatan, ketika ekonomi kembali pulih, pengelolaannya pun kembali normal.

Melalui UU No. 2/2020, serta Peraturan Presiden No. 54/2020, dan No. 72/2020, Pemerintah menyesuaikan anggaran dan melebarkan defisit untuk mendukung upaya penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi. Defisit anggaran diperbolehkan lebih dari 3% PDB selama masa penanganan Corona Virus, dan harus Kembali maksimal 3% PDB, pada 2023.

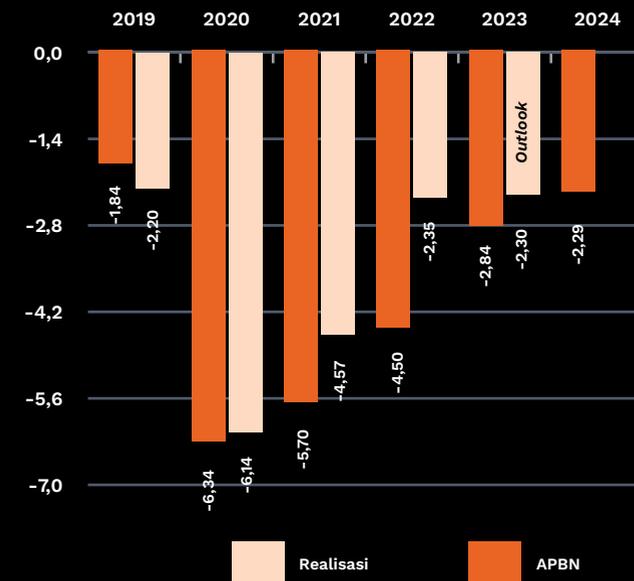
Strategi ini terbukti ampuh memperkuat ketahanan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Pada 2022, defisit anggaran sudah di bawah 3% dan ekonomi tumbuh 5,3%, di atas capaian sebelum pandemi.

RAPBN 2024 terus mengarah pada postur yang sehat dengan stimulus yang tetap kuat untuk akselerasi transformasi ekonomi Indonesia. Tentunya dengan dukungan pendapatan negara yang meningkat tajam, pada 2024.



Sumber Foto: Antara

Defisit APBN Tahun 2019 - 2024 (% PDB)



Sumber Data: Kementerian Keuangan RI



Sumber Foto: Antara

# Berkah Hilirisasi

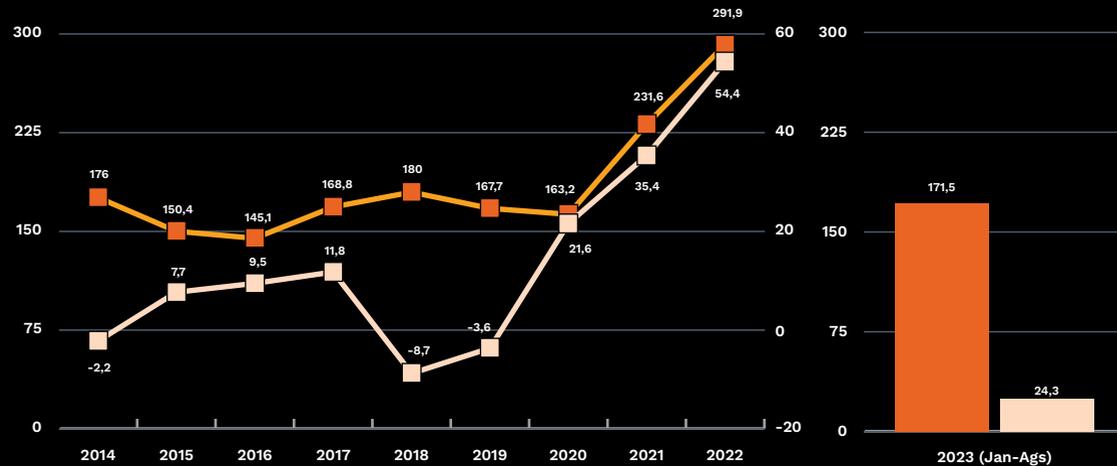
Di tengah ketidakpastian global, neraca perdagangan Indonesia justru surplus.

Tahun 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 291,9 miliar, dan surplus neraca perdagangan mencapai USD 54,5 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Dalam delapan bulan pertama 2023, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 171,5 miliar, dan surplus neraca perdagangan sebesar USD 24,3 miliar.

Hilirisasi tambang salah satu faktor utama mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Seperti hilirisasi nikel dan barang dari padanya, dari USD 0,65 miliar pada 2017 menjadi USD 5,94 miliar pada 2022, serta ferro-nickel, dari USD 1,33 miliar pada 2017 menjadi USD 13,62 miliar pada 2022.

Meski banyak negara yang menentang dengan cara ini, Indonesia tidak akan menghentikan kebijakan hilirisasi. Sebab kita yakin, akan menjadi lompatan besar kemajuan negara.

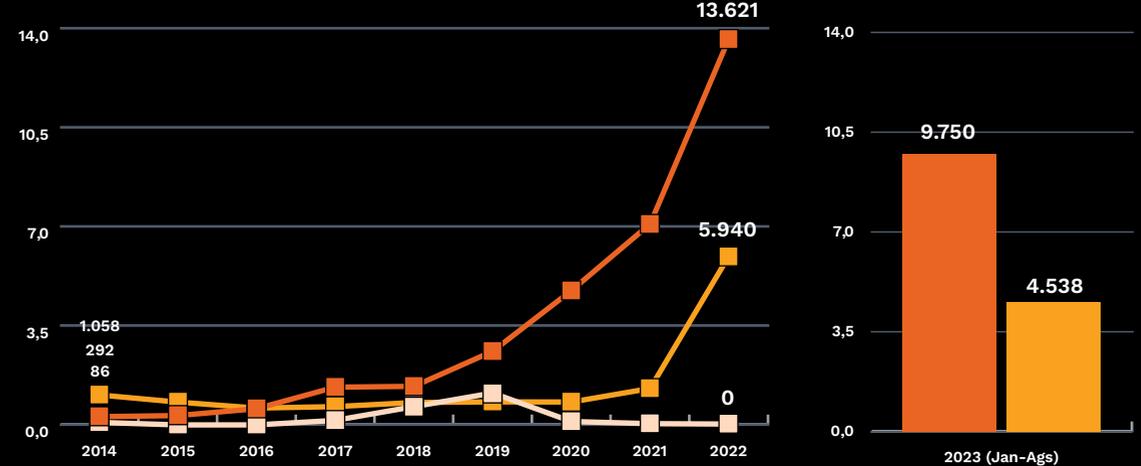
Nilai Ekspor & Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Ekspor Neraca Perdagangan

Nilai Ekspor Nikel & Komoditas Turunannya



Bijih Nikel Ferro-Nickel Nikel & turunannya

# Aksi Koreksi, Melejitkan Investasi

Awalnya, tumpang tindih aturan, ketidakpastian hukum, dan kerumitan prosedur perizinan menjadikan Indonesia bukan pilihan investasi. Mula pelayanan terpadu, *Online Single Submission Risk Based Approach*, merupakan aksi koreksi agar investasi mengalir dengan deras dan berkualitas secara sosial, lingkungan, dan tata kelola.

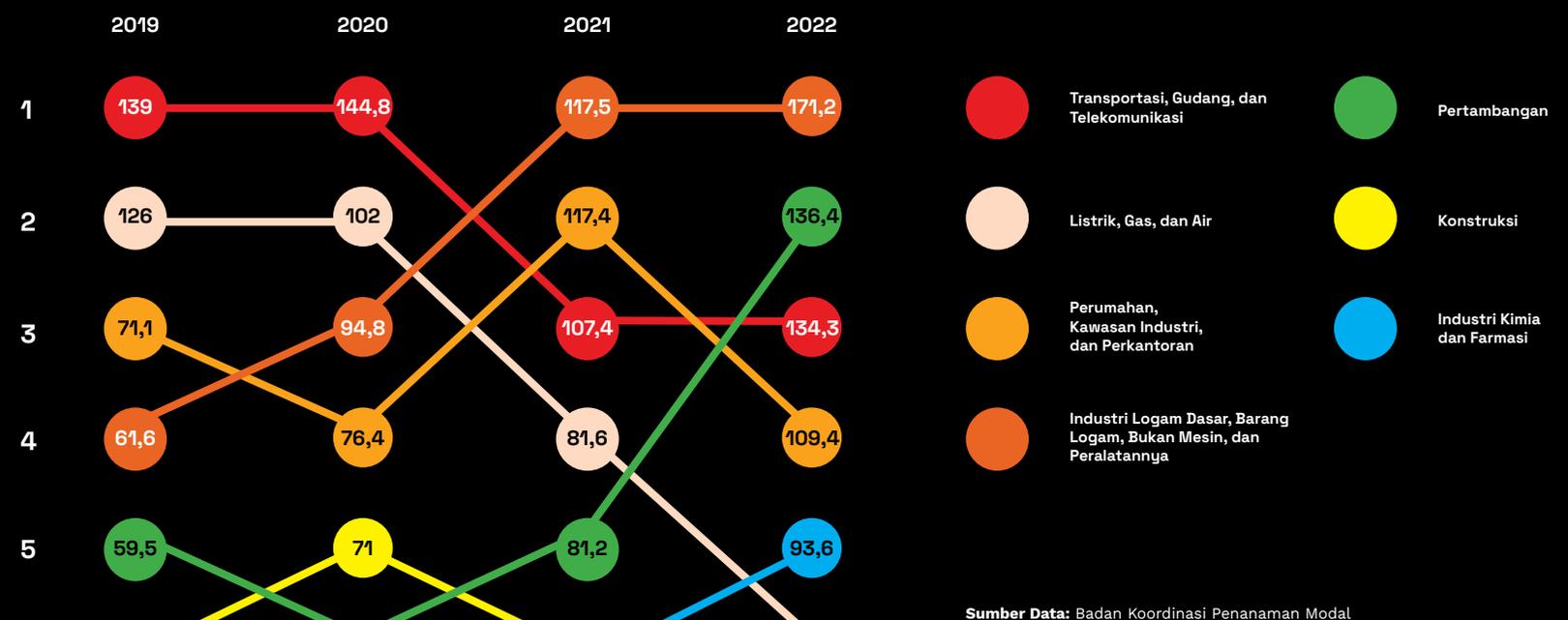
Investasi mencapai Rp826,3 triliun di tahun 2020. Melebihi janji pemerintah. Hingga tahun 2022 pun masih melampaui targetnya yakni Rp1.207 triliun.

Aktivitas ekonomi juga bergerak ke luar Jawa. Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi dengan realisasi investasi terbesar. Selain itu, sektor investasi pun bergeser ke arah industri logam dasar dan barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Itu tandanya, investasi memacu industrialisasi. Berbagai langkah korektif ini melejitkan investasi berkualitas di Indonesia.



Sumber Foto: Antara

## Investasi Antar Sektor (Rp triliun)



Sumber Data: Badan Koordinasi Penanaman Modal

# Jalan Alternatif Selaraskan Ekonomi dan Nilai Religi

Sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar dunia, penggunaan dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah dan infaq perlu dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan

Sektor keuangan syariah tumbuh pesat dan menempatkan Indonesia ke peringkat ketujuh dunia. Kontribusi sukuk syariah, diapresiasi oleh IsDB Prize Award tahun 2023. Bahkan, dunia pernah menempatkan Indonesia sebagai peringkat kedua untuk industri makanan halal, dan peringkat ketiga produk fesyen.

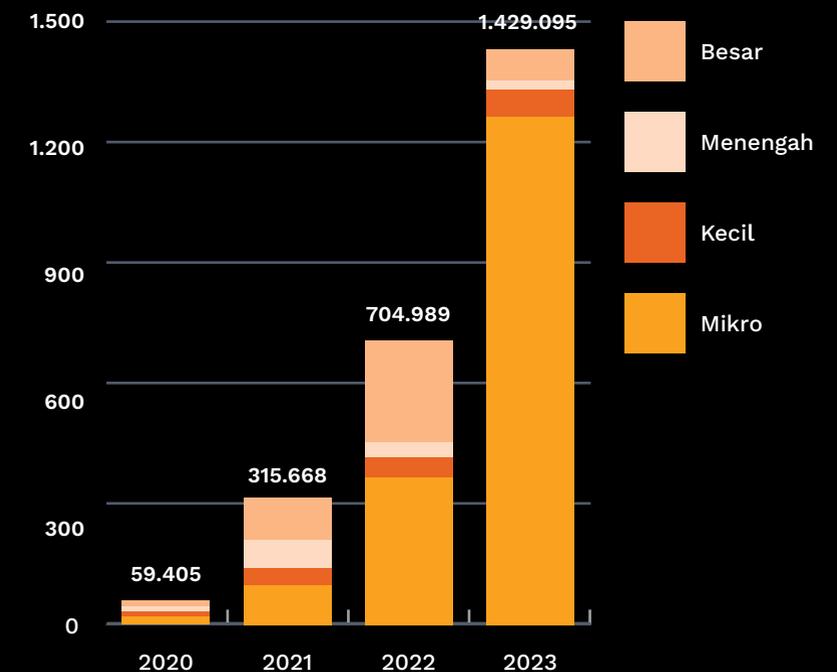
Penghargaan ini tidak terlepas dari peran perbankan syariah yang memberikan dukungan pembiayaan terutama pada sektor riil seperti UMKM. Di sisi lain, perbankan syariah juga mendukung perluasan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Ekosistem ekonomi syariah akan terus dikembangkan agar potensi ekonomi bermanfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya manfaat ekonomi syariah menjadi jalan alternatif untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai keagamaan pada masyarakat Indonesia.



Sumber Foto: BPMI Setwapres

## Rekap Jumlah Produk Bersertifikasi Halal



Sumber Data: Aplikasi SiHalal (20 Sep 2023)

# Mesin Kesejahteraan Masa Depan

Perkembangan teknologi informasi menuntut kegiatan ekonomi untuk berubah. Transformasi ke arah digital menjadi pilihannya. Lebih-lebih pandemi memberikan pelajaran penting, bahwa digitalisasi berkontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian.

Tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai US\$ 70 miliar, dan terus tumbuh berkembang hingga US\$ 77 miliar pada tahun 2022.

Tumbuhnya nilai ekonomi digital tak terlepas dari peran pemerintah sebagai lokomotif terwujudnya infrastruktur digital. Selain itu, kehadiran perusahaan teknologi, startup, dan peran lembaga keuangan, juga punya andil besar dalam membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Keandalan ekonomi digital akan memberikan harapan kesejahteraan di masa depan.

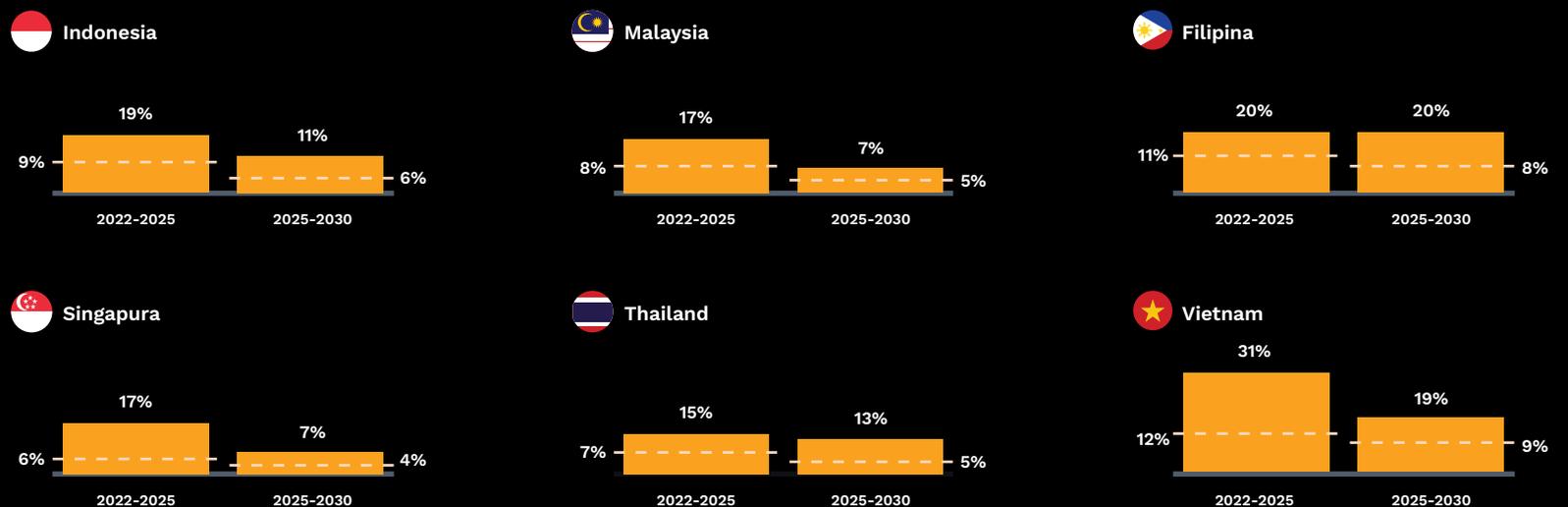
## Perkembangan Ekonomi Digital di ASEAN



## Total Populasi

# 600 Juta

## Pertumbuhan Ekonomi Digital vs Pertumbuhan PDB (%)



Sumber Data: Bain Analysis, IHS, Central Bank, World Bank

Perkiraan CAGR digital ekonomi

Perkiraan CAGR PDB nominal



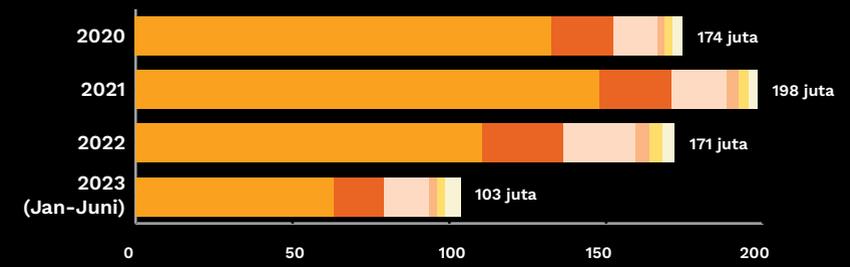
Sumber Foto: Antara

# Bukan Sekedar Menjadi 'Bali Baru'

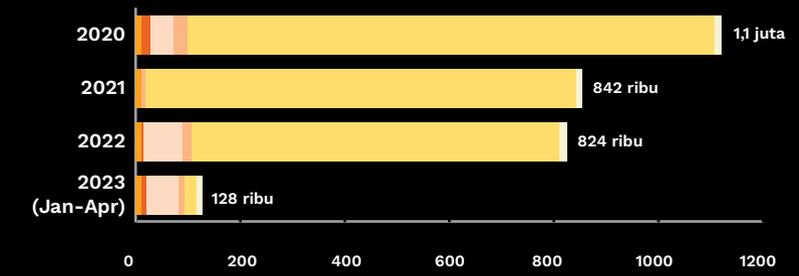
Keindahan alam Indonesia sudah sejak lama dikagumi para pelancong. Bali selalu menjadi tujuan utama hingga dirasa sudah mendekati titik jenuh.

Kita butuh tempat baru yang tak kalah jelita dibanding Bali. Pemerintah kemudian memutuskan lima destinasi wisata baru di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Inilah 'Bali Baru' bertajuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Selain keindahan alam, destinasi wisata dituntut untuk menata banyak hal. Kegiatan wisata yang atraktif dan edukatif bisa memberikan tetesan manfaat secara ekonomi.

## Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara



## Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



### Destinasi:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Perputaran uang saat para pembalap beradu cepat di Danau Toba dalam ajang F1 Powerboat 2023 diperkirakan mencapai Rp300 miliar. Borobudur menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum 2023, Rp5,6 triliun manfaat yang diperolehnya. ASEAN Summit di Labuan Bajo berdampak menambah pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai Barat hingga 3,26%. Langkah ini, menjadikan DPSP sebagai magnet baru perekonomian masyarakat.

# Agar Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian bangsa. Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) harus konsisten dan meluas agar produk negeri sendiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tahun 2022 menjadi momentum kebangkitan Gernas BBI. Ruang bagi UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa semakin terbuka. Penggunaan produk dalam negeri melejit mendekati Rp 800 triliun.

Faktor pentingnya, kemudahan bagi UMKM untuk mendaftar pada katalog elektronik. Namun, itu belum cukup. Pemakaian komponen dalam negeri juga harus diperbesar. Pemerintah memberikan insentif sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan mempercepat pencantuman produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN di dalam katalog elektronik. Strategi ini memuluskan jalan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.



**Capaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia**



Jumlah UMKM  
**64,2 juta**



Menyerap  
**97%**  
Tenaga Kerja



Kontribusi PDB  
**61,07%**  
atau senilai



Menghimpun  
**60,4%**  
Total Investasi

Sumber Data: Kementerian Keuangan RI

**Rp 8.573,89 triliun**

# Karena Laut adalah Harapan

Kontribusi sektor perikanan pada PDB Indonesia sempat menyentuh angka 5,73% pada tahun 2019, namun jeblok menjadi 2,79% pada tahun 2022. Penurunan ini menjadi alarm untuk segera berbenah.

Upaya menjaga kedaulatan laut terus dilakukan, seperti mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Pemanfaatan Kartu Kusuka diatur kembali untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kebijakan Kelautan Indonesia diperkuat dengan menerapkan penangkapan ikan terukur. Langkah

ini mengubah orientasi penangkapan ikan, dari input menjadi output control, dan dari terpusat menjadi desentralisasi WPP.

Perlindungan ekosistem laut juga dilakukan dengan mengintegrasikan penataan ruang laut dan darat. Orientasi perikanan tangkap juga diubah menjadi budidaya. Hilirisasi sektor perikanan digencarkan kembali dengan membangun industri perikanan dan membenahi rantai pasok dingin. Salah satunya adalah menjadikan produk perikanan *ready to eat, ready to cook*.



Sumber Foto: Antara

# Cerdas Wujudkan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan Indonesia menguat lagi pada 2022, setelah sempat melemah sepanjang dua tahun awal pandemi. Menurut Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia mencapai angka 60,2 pada tahun 2022. Lebih tinggi dibanding periode 2020-2021.

Fokus ketahanan pangan adalah memudahkan rakyat untuk mendapatkan pangan yang murah, berkualitas, dan mensejahterakan produsen (petani). Untuk mewujudkan itu, pemerintah melakukan berbagai siasat, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

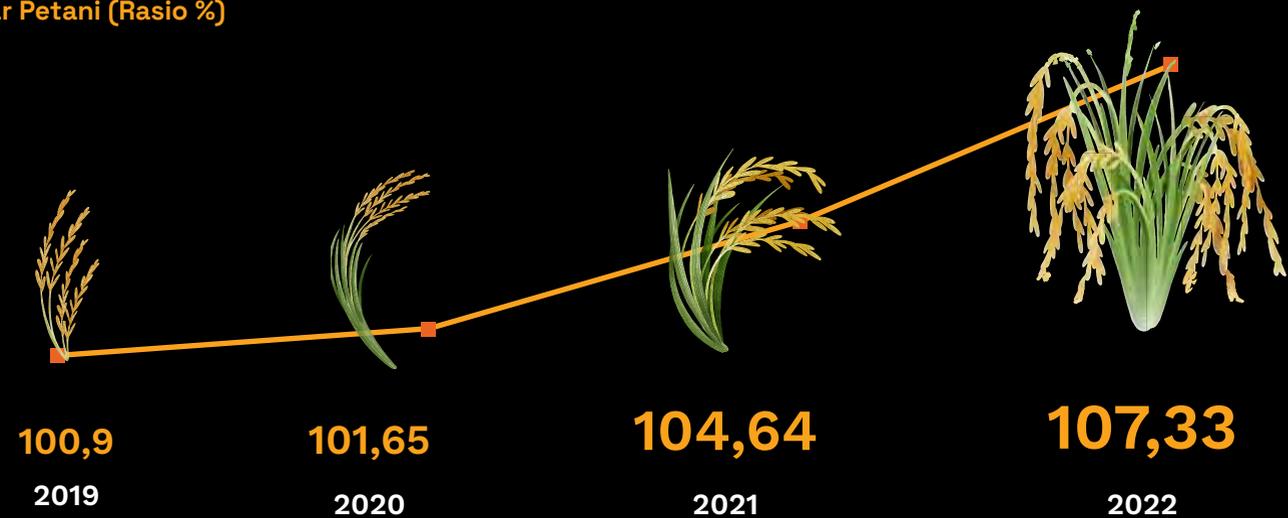
Siasat jangka panjang dilakukan dengan membangun food estate, bendungan, perbaikan irigasi, dan pencetakan sawah baru. Siasat jangka pendek dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Di hulu, pemerintah memberikan subsidi pupuk, obat-obatan, benih, hingga bantuan alsintan. Sedangkan di hilir, diberikan kemudahan pada pengendalian harga, pasokan, rantai distribusi, bantuan pangan, dan penguatan cadangan pangan daerah. Berbagai taktik ini untuk mewujudkan ketahanan pangan terwujud.



Sumber Foto: Antara

## Nilai Tukar Petani (Rasio %)



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

# Agar Langit Semakin Biru

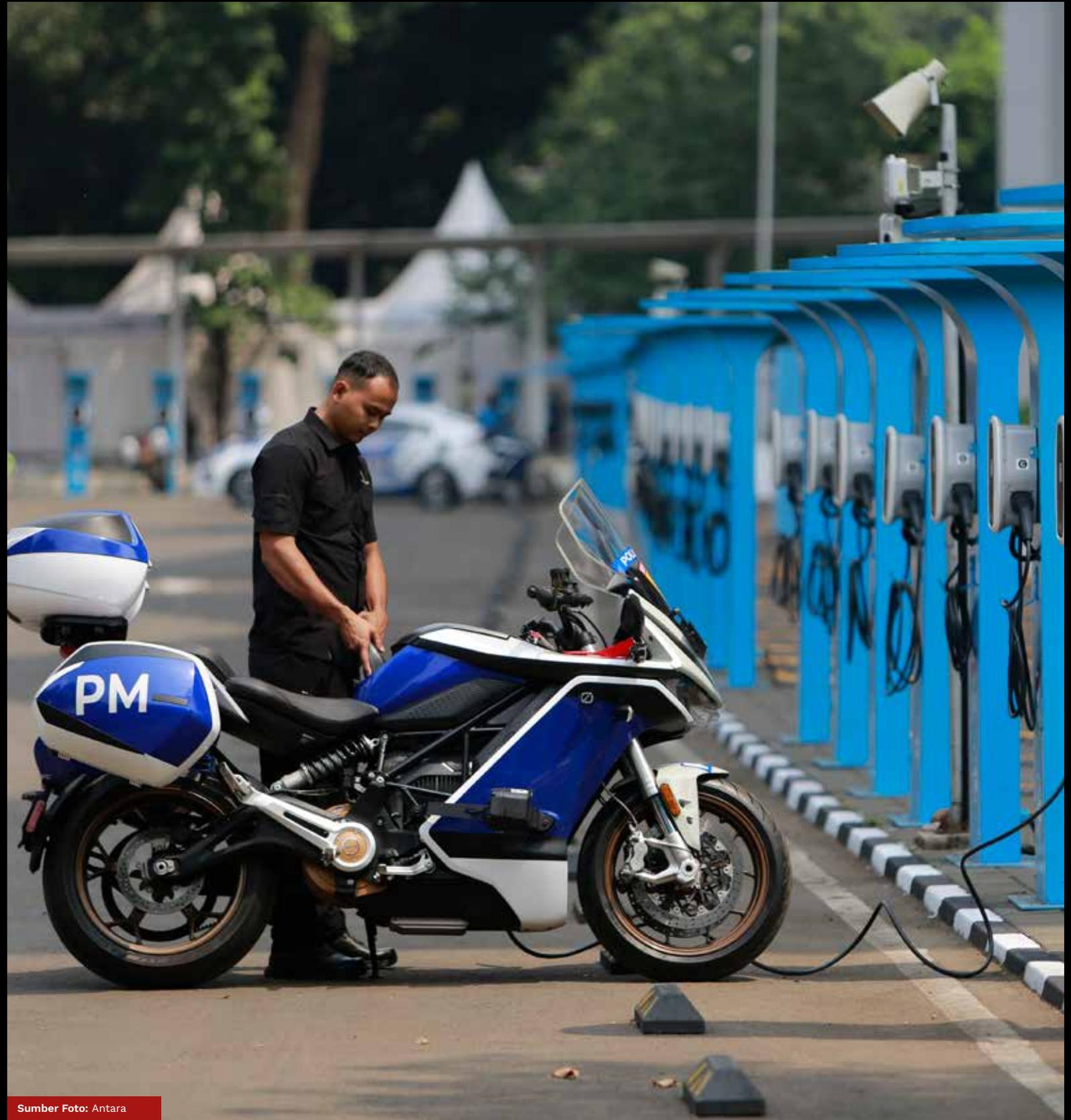
Perubahan iklim ancaman nyata bagi dunia. Merubah gaya hidup ke angkutan massal, kendaraan listrik, dan memanfaatkan energi bersih menjadi langkah penting.

Mentransformasikan energi bersih dengan memanfaatkan bioenergi seperti B35 (bio solar 35%), Bio Avtur, Bensin Sawit, hingga mewujudkan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

27 Komitmen beralih ke KLBB dimulai dengan penerbitan Perpres 55 Tahun 2019. Langkah ini disusul dengan regulasi dan implementasi untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya, mendorong kendaraan operasional pemerintah segera berganti menjadi kendaraan listrik.

Kini, industri kendaraan listrik dalam negeri menggeliat, seperti sepeda listrik, kendaraan roda 2, 3, dan 4, hingga bus listrik. Tahun 2023, lebih dari 60 ribu unit kendaraan listrik telah mengaspal. Lebih dari 1.000 unit stasiun pengisian umum (*charging station*) dan 1.300 unit tempat penukaran baterai juga sudah tersedia untuk melayani masyarakat.

Di hulu pun, industri baterai listrik segera akan hadir di tahun 2024 dengan kapasitas 200 ribu mobil. Semua upaya ini dilakukan agar langit Indonesia semakin biru.



Sumber Foto: Antara

# Demi Bumi Lebih Nyaman

Kenaikan muka air laut dan suhu bumi 1,5 derajat celcius menjadi bukti perubahan iklim sedang terjadi. Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan, menghijaukan hutan, dan menyediakan stok karbon bagi dunia.

Praselia itu diwujudkan dengan menekan laju deforestasi, meningkatkan reforestasi, pengelolaan sampah, pemulihan DAS, pengelolaan kawasan konservasi, hingga penurunan Efek Gas Rumah Kaca.

Hasilnya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup semakin membaik menjadi 72,42 poin di tahun 2022 dari target 69,22 poin. Lebih dari 4 juta hektar lahan gambut telah direstorasi, dan puluhan ribu hektar mangrove direhabilitasi. Selain itu, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga semakin meningkat, ditandai dengan berdirinya empat ribu dua ratus Kampung Iklim.

Sebagai komitmen kepada dunia, Indonesia juga menyusun *Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050*, menuju *net-zero emission* pada tahun 2060.

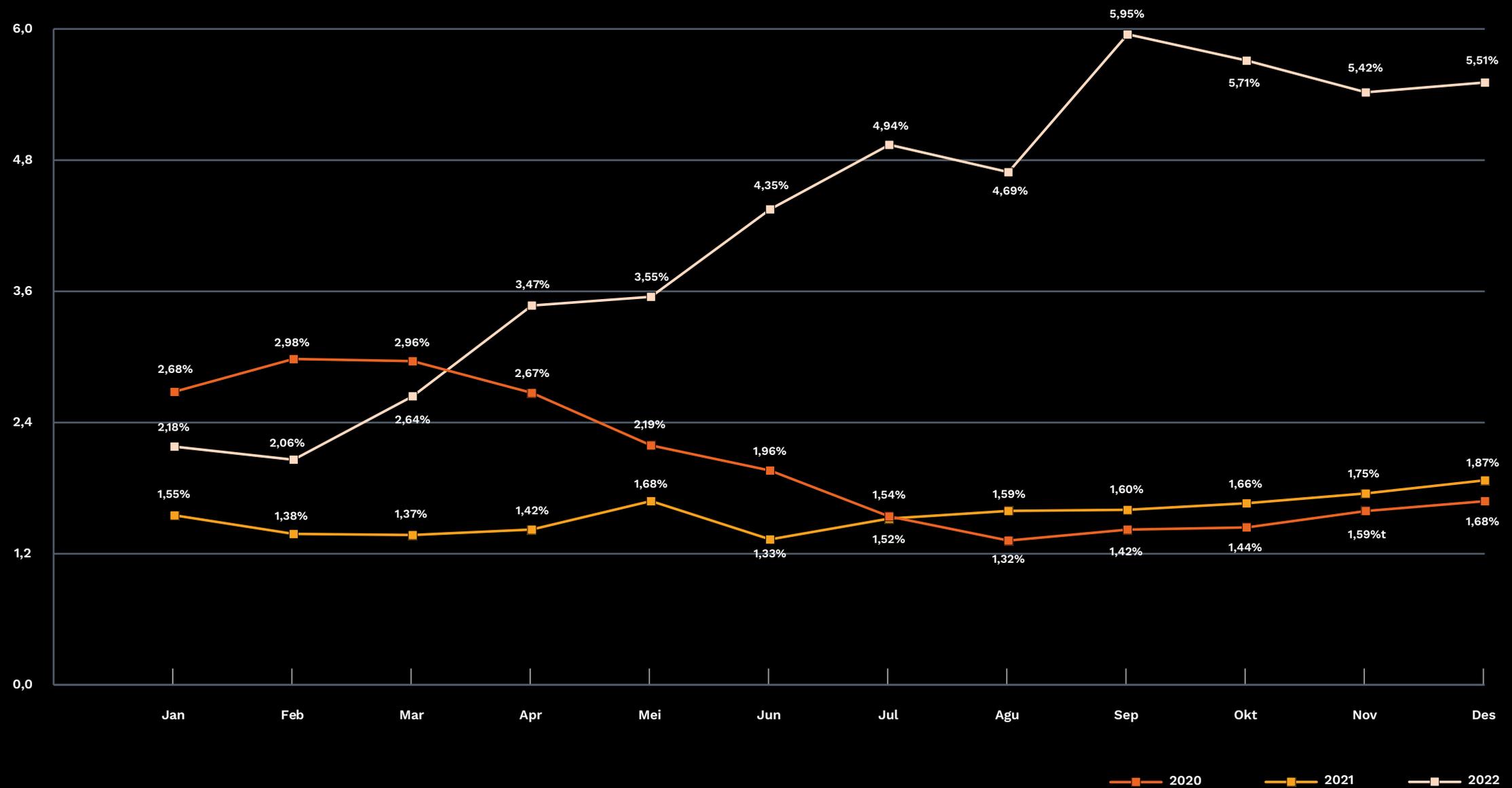
Sumber Data: Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI

## Persentase Capaian IKU (%)



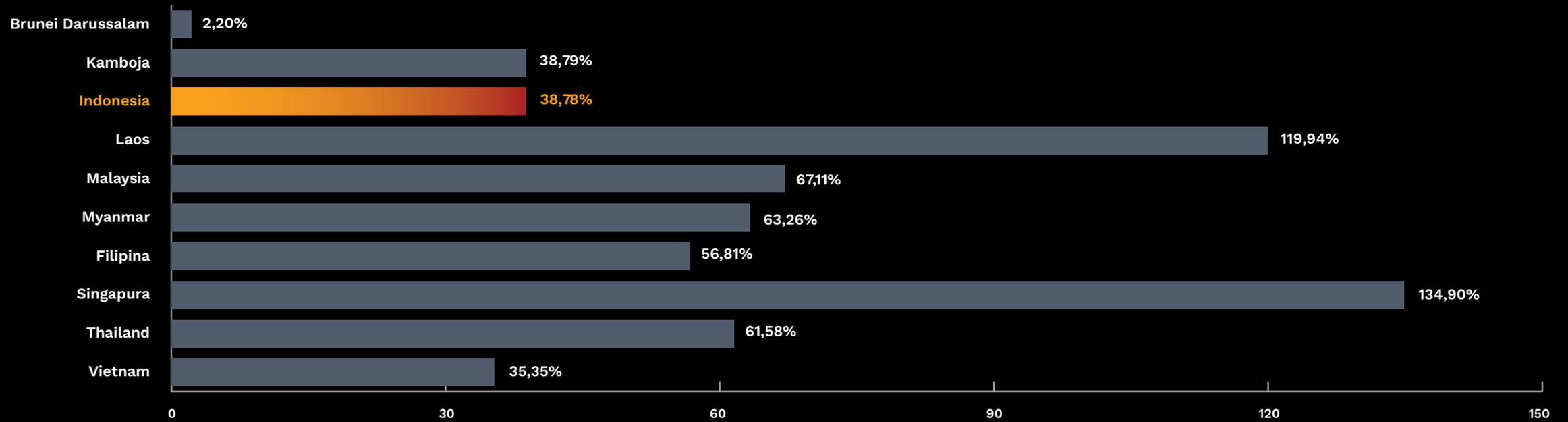
# Indonesia Dalam Angka

## Inflasi Tahunan Indonesia (yoy)



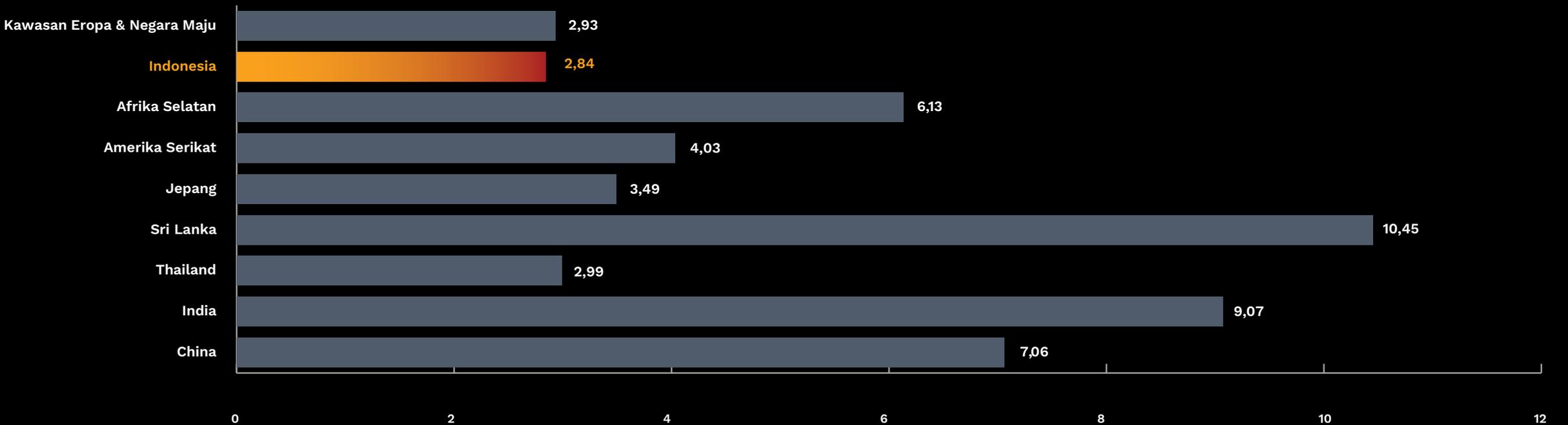
Sumber Data: Badan Pusat Statistik

### Proyeksi Rasio Utang Negara ASEAN terhadap PDB 2024



Sumber Data: Bursa Efek Indonesia

### Proyeksi Defisit Anggaran Tahun 2023 (% terhadap PDB)



Sumber Data: Fiscal Monitor, IMF